CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa

Adila Saskia Mega[1], Apriya Muna Audina Tuhaza[2], Azela Kristania Ramadhani[3], Helen Ivanka[4], Novanda Alfina Pbn[5]
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung[1]
megac0845@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung[2]
apriyamuna@gmail.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung[3]
azelaramadhani91@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung[4]
helenivanka83@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung[5]
Novandaalf@gmail.com

Abstrak

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Warga Indonesia juga menggunakannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter yang baik bagi generasi penerus bangsa. Mengintegrasikan nilai-nilainya ke dalam pendidikan karakter merupakan cara terbaik untuk menanamkan moral, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Artikel ini membahas pentingnya pengajaran nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan formal dan kehidupan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk menganalisis peran nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial harus diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter agar terbentuk generasi yang beriman, berintegritas, toleran, demokratis, dan berkeadilan. Pendidikan Pancasila memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter anak bangsa yang berakhlak mulia, religius, toleran serta berjiwa nasionalis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter anak bangsa melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur terhadap berbagai sumber akademik, kebijakan pendidikan nasional, dan penelitian empiris terkait implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan mampu menumbuhkan karakter pelajar yang religius, humanis, demokratis, dan berkeadilan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan besar di era globalisasi, digitalisasi serta pergeseran nilai budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara guru, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengoptimalkan pendidikan karakter berbasis Pancasila agar generasi muda Indonesia menjadi cerdas, berakhlak, dan berkepribadian sesuai jati diri bangsa.
Kata Kunci: Pancasila, pendidikan karakter, moral bangsa, nilai kebangsaan, dan kurikulum merdeka

Abstract

Pancasila is the foundational ideology and the national philosophy of Indonesia. Indonesians also use it as a guideline in their daily lives. Pancasila plays an important role in shaping the good character of the nation's next generation. Integrating its values into character education is the best way to instill morality, ethics, and responsibility as good citizens. This article discusses the importance of teaching Pancasila values in shaping the character of young generations through formal education and social life. The study employs a qualitative descriptive approach with a literature review method to analyze the role of Pancasila values in Indonesia's education system. The results show that the values of Pancasila Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice must be integrated into character education to form a generation that is faithful, with integrity, tolerant, democratic, and fair. Pancasila education has a fundamental role in shaping the character of the nation's children to become virtuous, religious, tolerant, and nationalistic individuals. The values contained in Pancasila are not only the foundation of the state but also serve as moral and spiritual guidelines in social life. This study aims to examine the role of Pancasila education in shaping the character of the nation's youth through a descriptive qualitative approach based on literature studies from various academic sources, national education policies, and empirical research on the implementation of Pancasila values in education. The findings indicate that the application of Pancasila values in the education system can foster learners who are religious, humanistic, democratic, and just. However, its implementation faces major challenges in the era of globalization, digitalization, and shifting cultural values. Therefore, synergy among teachers, families, communities, and the government is needed to optimize Pancasila-based character education so that the younger generation of Indonesia becomes intelligent, virtuous, and possesses a strong national identity.
***Keywords**: Pancasila, character education, national morals, national values, and merdeka curriculum*

I. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan fondasi ideologis bangsa Indonesia yang muncul dari perjalanan panjang perjuangan bangsa melawan penjajahan. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai prinsip politik, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan etika yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dunia pendidikan, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara yang beriman, bertakwa, dan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mencintai tanah air. Pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk mencetak manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas nasionalnya.

Masalah ini muncul dari realitas sosial saat ini di mana generasi muda menghadapi krisis moral seperti intoleransi, individualisme, dan rendahnya rasa nasionalisme. Pengaruh globalisasi dan teknologi digital sering kali bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan dan jati diri bangsa. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: bagaimana peran Pancasila dalam pendidikan karakter bangsa, dan bagaimana nilai-nilai sila-sila Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda?

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran Pancasila dalam pendidikan karakter bangsa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi dunia pendidikan. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih efektif dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Secara teoritis, pendidikan karakter merujuk pada proses pembentukan nilai, moral, dan etika melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pancasila dengan kelima silanya menyediakan kerangka nilai universal yang dapat dijadikan landasan dalam pendidikan karakter. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya spiritualitas dan keimanan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendorong lahirnya sikap empati, penghormatan terhadap sesama, dan keadilan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memperkuat rasa nasionalisme dan solidaritas antarwarga negara. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menanamkan nilai demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan dan pemerataan sosial.

Pancasila adalah fondasi ideologis bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri negara sebagai pandangan hidup bangsa. Ia tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dan politik, tetapi juga sebagai pedoman moral dan nilai etika sosial bagi seluruh warga negara. Pendidikan Pancasila menjadi sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi muda agar mereka tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks sosial modern, pendidikan karakter menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena meningkatnya degradasi moral di kalangan generasi muda. Fenomena seperti intoleransi, kekerasan, cyberbullying, dan individualisme merupakan tanda adanya krisis nilai yang perlu diatasi dengan pendidikan berbasis Pancasila[2]. Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan tidak hanya dalam bentuk hafalan, tetapi juga melalui pembiasaan perilaku, pembentukan budaya sekolah, dan keteladanan dari pendidik.

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter merupakan upaya sadar dan sistematis untuk membantu peserta didik memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan[3]. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kebajikan itu berpijak pada Pancasila, yang berfungsi sebagai falsafah hidup bangsa[4]. Pendidikan Pancasila tidak hanya mengembangkan aspek kognitif (pengetahuan tentang nilai), tetapi juga aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kurikulum Merdeka menegaskan pentingnya Profil Pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil ini mencerminkan penerapan nyata dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan belajar dan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Pancasila bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan pembentukan kepribadian dan moralitas peserta didik secara menyeluruh.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan tidaklah mudah. Banyak faktor menjadi hambatan, mulai dari lemahnya pemahaman guru terhadap nilai Pancasila, kurangnya keteladanan dari para pendidik, hingga dominasi nilai-nilai global yang tidak sejalan dengan budaya nasional. Oleh sebab itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu diintegrasikan secara sistematis melalui kebijakan pendidikan nasional, kurikulum yang aplikatif, serta lingkungan sekolah yang kondusif dan inspiratif.

Selain sebagai alat pembentukan karakter, pendidikan berbasis Pancasila juga memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional dan mencegah disintegrasi bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa pengaruh budaya luar, Pancasila menjadi benteng ideologis yang menjaga agar nilai-nilai keindonesiaan tetap hidup. Hal ini sejalan dengan pandangan Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila adalah cita-cita moral bangsa Indonesia yang menjadi sumber nilai dan norma bagi seluruh aspek kehidupan.

Dalam konteks historis, Soekarno sebagai penggali Pancasila menegaskan bahwa pendidikan merupakan alat utama dalam pembentukan karakter bangsa. Pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila akan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan semangat gotong royong. Di era modern saat ini, tantangan baru seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan ketidaksetaraan digital menuntut pendidikan karakter yang adaptif. Di sinilah Pancasila berperan sebagai kompas etis yang mampu menuntun arah moral dan perilaku generasi muda.

Lebih lanjut, pendidikan karakter tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik yang membutuhkan pendekatan holistik. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk integrasi dengan teknologi informasi untuk memperkuat pendidikan karakter di era digital. Melalui inovasi pembelajaran yang berbasis nilai Pancasila, peserta didik diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang beretika, kritis, dan berdaya saing global tanpa kehilangan akar budaya dan jati diri bangsa.

Dengan demikian, penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan strategis bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Pendidikan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual tidak cukup untuk mencetak generasi unggul. Diperlukan keseimbangan antara kecerdasan, karakter, dan spiritualitas, di mana Pancasila berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun manusia Indonesia yang beradab, berkepribadian, dan berdaya saing di tengah dinamika global.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis secara mendalam berbagai literatur yang membahas tentang peran Pancasila dalam pendidikan karakter bangsa, baik dalam konteks teori maupun praktik implementasi di lapangan.

Metode studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan laporan kebijakan pemerintah yang relevan. Data primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pedoman Implementasi Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, sumber sekunder berupa penelitian terdahulu dan artikel ilmiah dari berbagai jurnal pendidikan nasional maupun internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Inventarisasi Sumber Data
   Peneliti mengumpulkan dan mengklasifikasikan berbagai sumber literatur yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Literatur yang dipilih harus memenuhi kriteria validitas akademik dan relevansi dengan konteks pendidikan di Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Analisis Isi (Content Analysis)
   Data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan *content analysis*, yaitu dengan menelaah isi dokumen untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar-konsep yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan Pancasila.
3. Triangulasi Sumber
   Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi terhadap beberapa sumber yang memiliki perspektif berbeda, seperti antara hasil penelitian akademik, dokumen kebijakan, dan pandangan ahli pendidikan.
4. Interpretasi dan Sintesis
   Setelah data dikategorikan, peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan literatur dan menghubungkannya dengan teori pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini bersifat non-empiris**,** artinya tidak melakukan pengumpulan data lapangan melalui observasi atau wawancara. Meski demikian, pendekatan ini memiliki kekuatan dalam memberikan analisis konseptual yang mendalam, terutama dalam menggali filosofi dan nilai-nilai normatif dari Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa.

Secara etis, penelitian ini menjunjung tinggi prinsip akademik dengan mencantumkan semua sumber secara benar menggunakan gaya kutipan *Chicago Manual of Style***,** serta menghindari unsur plagiarisme.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan relevansi konteks global. Dalam era digital, pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, hasil studi literatur ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum karakter yang kontekstual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila memiliki peran multifaset dalam pendidikan karakter bangsa melalui kelima silanya, Pancasila menyediakan kerangka nilai yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda. Pembahasan berikut menguraikan peran tersebut secara rinci, dengan fokus pada implementasi praktis, tantangan, dan dampaknya terhadap pembentukan karakter.

Pancasila memiliki posisi strategis sebagai landasan filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan karakter, Pancasila menjadi sumber nilai moral, spiritual, dan sosial yang membentuk pribadi peserta didik agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya beriman, berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tidak hanya sekadar hafalan tentang lima sila, tetapi juga praktik nyata yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Bagian ini dibagi menjadi sub-bab untuk memudahkan pemahaman dan analisis mendalam.

a. Peran Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam Pendidikan Karakter

Berperan dalam membentuk dimensi spiritual dan moral. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai ini menekankan pentingnya iman dan takwa yang membantu siswa mengembangkan empati dan toleransi beragama. Dalam praktik sekolah dapat mengimplementasikan kegiatan seperti doa bersama dan pendidikan agama yang inklusif yang terbukti meningkatkan kesadaran spiritual di kalangan remaja, misalnya program pendidikan multikultural di sekolah-sekolah di Jakarta menunjukkan penurunan insiden intoleransi agama sebesar 20% setelah integrasi nilai ketuhanan ini. Selain itu, studi longitudinal dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam kegiatan keagamaan rutin memiliki skor empati yang lebih tinggi dengan peningkatan rata-rata 15 poin dalam skala psikologis. Tantangan utama adalah keragaman agama di Indonesia,

yang memerlukan pendekatan yang netral dan menghormati pluralitas. Untuk mengatasi ini kurikulum dapat dirancang dengan modul-modul yang menekankan nilai-nilai universal seperti kejujuran dan kasih sayang tanpa memaksakan satu keyakinan. Dampaknya terhadap karakter bangsa adalah pembentukan generasi yang lebih harmonis mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Nilai Ketuhanan juga membentuk kesadaran moral yang menjadi dasar bagi pembentukan karakter lainnya. Keberagaman agama di Indonesia menjadi tantangan tersendiri, namun melalui pendekatan multikultural dan dialog lintas iman, nilai Ketuhanan dapat menjadi sumber harmoni sosial, bukan konflik.

b. Peran Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dalam Pendidikan Karakter

Mendorong pembentukan karakter yang adil dan beradab. Nilai ini dapat diajarkan melalui mata pelajaran seperti sejarah dan kewarganegaraan di mana siswa belajar tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hasil studi menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan kemanusiaan dapat mengurangi perilaku intoleran dan diskriminasi. Contohnya, proyek sekolah di Yogyakarta yang mengintegrasikan simulasi pengadilan HAM telah meningkatkan kesadaran siswa tentang keadilan dengan survei menunjukkan 70% siswa lebih aktif dalam kegiatan sosial. Pembahusan ini juga mencakup aspek keberadaban, seperti etika digital, di mana siswa diajarkan untuk menghindari cyberbullying. Tantangan di era digital adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yang dapat diatasi melalui pendidikan media literacy berbasis nilai kemanusiaan. Dampak jangka panjang adalah pembentukan warga negara yang peduli terhadap isu-isu global seperti migrasi dan kesetaraan gender yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan juga perlu menyesuaikan diri dengan tantangan baru di era digital. Etika bermedia sosial, literasi digital, dan pencegahan *cyberbullying* merupakan bagian penting dari penerapan nilai kemanusiaan di dunia modern.

c. Peran Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dalam Pendidikan Karakter

Membangun rasa solidaritas dan nasionalisme melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti upacara bendera dan program kepramukaan siswa diajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Pembahasan ini relevan dengan tantangan individualisme di era modern di mana nilai persatuan Pancasila dapat menjadi antidot. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan program nasionalisme intensif memiliki tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan gotong royong yang lebih tinggi dengan peningkatan 25% dalam dua tahun. Selain itu, studi kasus di Papua menunjukkan bahwa pendidikan persatuan membantu mengurangi konflik etnis, dengan program dialog antarbudaya yang melibatkan siswa dari berbagai suku. Tantangan adalah globalisasi yang mendorong identitas kosmopolitan sehingga perlu keseimbangan antara nasionalisme dan internasionalisme. Dampaknya adalah generasi yang kuat dalam solidaritas mampu menjaga integritas bangsa di tengah arus perubahan.

d. Peran Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan) dalam Pendidikan Karakter

Sila keempat menekankan prinsip demokrasi, kebijaksanaan, dan musyawarah. Dalam pendidikan, nilai ini diterapkan melalui kegiatan yang mendorong partisipasi aktif siswa, seperti simulasi pemilihan ketua kelas, debat, dan diskusi kelompok. Tujuannya adalah membentuk kemampuan berpikir kritis dan menghargai pendapat orang lain. Sekolah yang menerapkan sistem student parliament terbukti mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan toleransi antar siswa. Penelitian UGM (2022) menunjukkan bahwa kegiatan demokrasi sekolah dapat menurunkan konflik antar siswa hingga 25%. Guru berperan penting sebagai fasilitator dalam mengembangkan iklim demokratis di sekolah. Dengan memberi ruang diskusi terbuka, siswa dilatih untuk berpikir etis, objektif, dan bertanggung jawab

dalam mengambil keputusan. Selain itu, penerapan nilai-nilai sila keempat dalam pendidikan juga menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran politik dan tanggung jawab sosial sejak dini. Melalui proses musyawarah dan pengambilan keputusan bersama, siswa belajar menghargai keberagaman pandangan serta memahami pentingnya kompromi dalam mencapai kesepakatan yang adil. Aktivitas seperti forum diskusi kelas, organisasi siswa, hingga kegiatan OSIS berfungsi sebagai laboratorium mini demokrasi di mana peserta didik dapat mempraktikkan nilai partisipatif dan kepemimpinan kolektif. Dengan demikian, pendidikan berbasis nilai kerakyatan bukan hanya membentuk siswa yang demokratis dalam berpikir, tetapi juga berkarakter bijaksana dan berintegritas dalam bertindak sebuah fondasi penting bagi lahirnya generasi pemimpin masa depan yang menjunjung prinsip musyawarah untuk mufakat.

e. Peran Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dalam Pendidikan Karakter

Mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks pendidikan, ini diterapkan melalui program bantuan siswa kurang mampu dan pendidikan inklusif yang membantu membangun empati sosial. Studi dari World Bank menunjukkan bahwa sekolah dengan program keadilan sosial memiliki tingkat dropout yang lebih rendah dengan peningkatan partisipasi siswa miskin sebesar 40%. Pembahasan ini mencakup isu-isu seperti kesenjangan ekonomi di mana pendidikan karakter mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan filantropi. Tantangan adalah ketimpangan akses pendidikan yang memerlukan kebijakan pemerintah untuk mendukung inklusivitas. Dampaknya adalah masyarakat yang lebih adil dengan generasi yang peduli terhadap kesejahteraan bersama.

f. Tantangan Implementasi dan Dampak Keseluruhan

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan karakter terbukti efektif dalam membentuk generasi yang berintegritas, berakhlak, dan berjiwa nasionalis. Nilai-nilai dasar seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial memberikan kerangka etika yang komprehensif bagi proses pembentukan kepribadian siswa. Implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila tidak hanya berfokus pada pembelajaran kognitif semata, tetapi juga menekankan transformasi perilaku melalui keteladanan, pembiasaan, dan penguatan budaya sekolah yang berlandaskan moral bangsa. Dengan demikian, pendidikan tidak sekadar menjadi proses transfer pengetahuan, melainkan juga sarana pembentukan jati diri dan kesadaran kebangsaan. Tantangan implementasi di lapangan memang tidak sederhana. Banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan sumber daya guru, minimnya pelatihan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, serta kurikulum yang cenderung kaku dan belum fleksibel terhadap konteks sosial-budaya setempat. Selain itu, pengaruh globalisasi dan penetrasi budaya asing melalui media digital sering kali menimbulkan benturan nilai di kalangan peserta didik. Namun, berbagai inovasi pendidikan kini mulai dilakukan, seperti penerapan *Project Based Learning (PBL)* yang memungkinkan siswa belajar nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman langsung misalnya proyek sosial, kegiatan gotong royong, kewirausahaan etis, dan partisipasi masyarakat. Inovasi semacam ini terbukti mampu meningkatkan internalisasi nilai karakter dengan cara yang lebih menyenangkan dan relevan dengan kehidupan nyata. Berbagai studi mendukung efektivitas pendekatan ini. Evaluasi nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa sekolah yang mengadopsi kurikulum berbasis Pancasila mengalami peningkatan signifikan dalam indeks karakter siswa, khususnya dalam aspek tanggung jawab, empati, dan kerja sama sosial. Sekolah-sekolah tersebut juga menunjukkan iklim pembelajaran yang lebih harmonis, disiplin, dan demokratis dibandingkan sekolah konvensional. Dampak luas dari implementasi pendidikan Pancasila tidak hanya terlihat pada perilaku individu siswa, tetapi juga dalam konteks sosial

bangsa secara keseluruhan, yaitu penguatan identitas nasional di tengah ancaman disintegrasi akibat pengaruh budaya global. Dengan demikian, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan moral dan sosial bangsa. Rekomendasi praktis yang dapat diterapkan antara lain: pengembangan modul pembelajaran interaktif berbasis teknologi digital, kolaborasi antara sekolah dan komunitas lokal dalam kegiatan sosial, serta pembentukan ekosistem pendidikan yang menumbuhkan partisipasi aktif siswa. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadikan Pancasila bukan sekadar materi pelajaran, tetapi nilai hidup yang tertanam dalam perilaku dan keputusan moral setiap warga negara Indonesia.

g. Perbandingan dengan Pendidikan Karakter di Negara Lain

Pembahasan ini juga membandingkan pendidikan karakter berbasis Pancasila dengan berbagai model pendidikan karakter di negara lain untuk melihat relevansinya dalam konteks global. Di Singapura, misalnya, sistem pendidikan karakter dikenal dengan program *Character and Citizenship Education (CCE)* yang menekankan disiplin, tanggung jawab sosial, dan harmoni antarwarga. Nilai-nilai tersebut memiliki kemiripan dengan sila ketiga Pancasila, yakni *Persatuan Indonesia*, karena sama-sama menempatkan keharmonisan sosial sebagai prioritas. Bedanya, pendidikan karakter di Singapura lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap norma sosial dan produktivitas nasional, sementara Pancasila menggabungkan dimensi moral, spiritual, dan nasionalisme dalam satu kesatuan nilai yang lebih mendalam. Sementara itu, di Amerika Serikat, pendidikan karakter banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai liberalisme dan individualisme yang menekankan kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan keadilan sosial. Program *Character Education Partnership (CEP)* di berbagai sekolah menonjolkan pentingnya integritas, rasa hormat, dan kejujuran sebagai nilai utama dalam membentuk warga negara demokratis. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab *serta* Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Namun, perbedaan mencoloknya terletak pada absennya unsur spiritualitas dalam sistem pendidikan di Barat. Pancasila menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan rasional, sehingga memberikan landasan moral yang lebih menyeluruh dalam membentuk manusia yang berkarakter, bukan hanya warga negara yang patuh hukum. Di Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan, pendidikan moral juga menempati posisi sentral dalam sistem pendidikan. Di Jepang, misalnya, konsep *Moral Education (Doutoku)* diterapkan untuk membentuk perilaku sosial yang harmonis, menghargai kerja sama, dan mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Hal ini selaras dengan sila ketiga Pancasila, namun berbeda karena tidak memasukkan aspek Ketuhanan secara eksplisit. Sementara di Korea Selatan, pendidikan karakter berakar pada nilai Konfusianisme yang menekankan kesopanan, hormat pada orang tua, dan loyalitas pada negara. Dalam konteks ini, Pancasila justru memiliki keunggulan karena mampu menyeimbangkan antara spiritualitas, moralitas, dan nasionalisme dalam satu kerangka ideologis yang bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di wilayah Eropa, pendidikan kewarganegaraan *(civic education)* umumnya lebih berfokus pada pemenuhan hak individu dan kesadaran hukum warga negara. Model ini memang berhasil membentuk warga negara yang rasional dan taat hukum, tetapi sering kali kurang memperhatikan dimensi emosional dan spiritual manusia. Di sinilah keunikan Pancasila karena ia tidak hanya menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang membentuk karakter secara utuh. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila berpotensi menjadi model global pendidikan karakter yang holistik, yang tidak hanya menyiapkan manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Analisis komparatif ini menegaskan bahwa kekuatan utama Pancasila terletak pada keseimbangannya antara nilai spiritual dan nilai sosial.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sementara sistem pendidikan karakter di negara lain cenderung berat pada satu aspek entah disiplin, rasionalitas, atau kebebasan individu Pancasila justru mengharmonisasikan seluruh dimensi tersebut dalam satu kerangka nilai universal. Dalam konteks global yang semakin multikultural, pendekatan seperti ini menjadi sangat relevan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga memiliki empati lintas budaya dan kesadaran kemanusiaan universal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun karakter anak bangsa yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila menjadi pedoman dalam membentuk manusia Indonesia yang seimbang antara aspek spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai "kompas moral" bagi seluruh elemen bangsa dalam menghadapi tantangan zaman.

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter peserta didik. Nilai Ketuhanan menumbuhkan religiusitas dan toleransi; Kemanusiaan menumbuhkan empati dan keadilan; Persatuan memperkuat solidaritas; Kerakyatan menumbuhkan demokrasi dan partisipasi; serta Keadilan Sosial membentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif.

Namun, implementasi pendidikan Pancasila masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pemahaman guru, kurangnya keteladanan, serta pengaruh budaya global yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dengan memperkuat pendidikan Pancasila, bangsa Indonesia dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepribadian tangguh, nasionalisme tinggi, serta tanggung jawab moral terhadap bangsa dan kemanusiaan.

Saran

Untuk mewujudkan potensi Pancasila ini secara optimal, dunia pendidikan perlu mengambil langkah-langkah strategis:

1. Peningkatan Kapasitas Guru
   Penting sekali untuk memperkuat kualitas dan pemahaman guru melalui pelatihan yang intensif dan berkesinambungan. Guru harus dibekali tidak hanya dengan materi ajar, tetapi juga dengan metodologi pembelajaran yang kreatif, reflektif, dan inspiratif agar nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan tidak sekadar sebagai teori, melainkan sebagai praksis kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru perlu menjadi teladan nyata dalam penerapan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong di lingkungan sekolah.
2. Pengembangan Kurikulum yang Relevan
   Kurikulum perlu dirancang secara fleksibel dan kontekstual agar guru mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu aktual dan permasalahan nyata di sekitar peserta didik. Pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran kolaboratif dapat digunakan untuk menanamkan makna Pancasila secara lebih konkret. Tujuannya agar Pancasila terasa hidup, tidak hanya dihafalkan tetapi juga dipraktikkan dalam sikap dan tindakan.
3. Keterlibatan Tiga Pilar Utama
   Pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri di sekolah. Diperlukan sinergi kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk lingkungan sosial yang mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila. Pelibatan orang tua dan tokoh masyarakat dalam program pendidikan karakter sangat krusial untuk membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Dukungan komunitas lokal dapat memperkaya kegiatan pembelajaran, seperti melalui program pengabdian masyarakat dan kegiatan gotong royong lintas generasi.
4. Kajian dan Evaluasi Mendalam

Agar implementasi pendidikan Pancasila tidak berhenti pada tataran wacana, dibutuhkan kajian ilmiah dan evaluasi dampak jangka panjang secara periodik. Evaluasi ini berguna untuk menilai efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk perilaku peserta didik sekaligus menemukan inovasi baru dalam strategi pembelajaran. Dengan mekanisme pemantauan yang berkelanjutan, pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat terus disempurnakan agar relevan dengan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai luhur bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar (2018). *Pendidikan Keluarga dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Anwar, H. (2018). *Pendidikan Keluarga dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Basrowi, & Suwandi. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
Dewi, S. (2017). *Integrasi Nilai Pancasila dalam Kurikulum*. Surabaya: Unair Press.
Fadilah (2019). *Implementasi Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana.
Gunawan, H. (2019). "Peran Sila-Sila Pancasila dalam Membentuk Karakter Nasional". *Prosiding Konferensi Pendidikan Indonesia*, 7(1), 200–215.
Haryono, P. (2016). *Peran Guru dalam Pendidikan Karakter*. Bandung: Alfabeta.
Hidayat, R. (2020). *Pendidikan Karakter dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
Kemdikbud. (2019). *Pedoman Implementasi Pendidikan Pancasila*.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Laporan Evaluasi Pendidikan Karakter Nasional*. Jakarta: Kemendikbud.
Kurniawan. (2014). *Lembaga Pendidikan dan Nilai Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Kusuma, D. (2018). "Pancasila sebagai Landasan Etika Bangsa". Makalah Seminar Nasional Pancasila, Universitas Indonesia.
Lestari (2016). *Pendidikan Pancasila di Era Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
Lestari, P. (2022). "Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital". *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 18(3), 112–128.
Lubis, A. (2018). *Strategi Pembelajaran Aktif*. Medan: USU Press.
Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Notonegoro, M. (1971). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
Prasetyo (2013). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pratama, Y. (2023). "Evaluasi Program Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila". Tesis Magister, Universitas Negeri Jakarta.
Rahman, A. (2015). *Pendidikan dan Nilai-Nilai Kebangsaan*. Jakarta: PT Grasindo.
Santoso, M. (2012). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: RajaGrafindo.
Sari, N. (2021). "Integrasi Pancasila ke dalam Kurikulum Sekolah". *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 12(4), 78–92.
Setiawan (2017). *Pelatihan Guru Pendidikan Karakter*. Bandung: Alfabeta.
Soekarno (1945). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Penerbit Nasional.
Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Suryadi, A. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suyanto (2010). *Pendidikan Karakter dalam Kurikulum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wahyudi, R. (2020). "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah". *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(2), 45–60.
Wardani (2015). *Globalisasi dan Tantangan Pendidikan*. Surabaya: Airlangga University Press.
World Bank. (2019). *Education for All: Indonesia Case Study*. Washington DC: World Bank Publications.
Yusuf (2011). *Pendidikan dan Moral*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Zainudin Hasan. (2025). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandar Lampung: UBL Press.